BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Tempat Kerja Praktek

2.1.1 Sejarah Instansi

Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Bandung semula bernama Departemen Kerja Republik Indonesia, ini tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa dan tatanan politik yang berkembang sejak proklamasi 17 agustus 1945 . Sejak Berdirinya pemerintahan atau departemen yang diserahi tugas untuk menangani masalah tenaga kerjaan yang berulangkali mengalami perubahan, baik pembentukan baru, penyesuaian maupun penggabungan. Perubahan organisasi tersebut disebabkan berkembangnya beban kerja yang harus ditangani.

Berdasarkan keputusan Presiden No. 44 tahun 1947 organisasi departemen tenaga kerja berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi dengan struktur organisasi diatur dalam keputusan menteri NAKERTRANSKOP Nomor Kep-1000/MEN/1947.

Pada Dinas Tenaga Kerja terdapat visi dan misi, dimana penempatan visi dari DISNAKER kota Bandung didasarkan atas komitmen tentang gambaran masa depan yang ingin diwujudkan untuk mengjungjung terwujudnya visi kota bandung. Dengan demikian visi yang telah ditetapkan terjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi serta diharapkan menjadi motor penggerak setiap unsur organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung :

“Menjadikan penyelenggaraan ketenagakerjaan terbaik, guna meningkatkan kesempatan kerja, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendorong kinerja dunia usaha “.

Sedangkan Misi dari Disnaker sendiri yaitu ditetapkannya berdasarkan hasil kajian bersama secara objektif untuk mendorong alokasi sumber daya diseluruh organisasi guna memecahkan masalah ketenagakerjaan secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Dengan demikian akan memberikan arah jangka panjang dan stabilitas dalam managemen dan kepemimpinan organisasi.

Misi DInas Tenaga Kerja Kota Bandung :

1. Meningkatkan Keahlian , keterampilan dan produktivitas tenaga kerja
2. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja
3. Mendorong tercapainya usaha mandiri
4. Mendorong terwujudnya hubungan indrustial yang harmonis
5. Mewujudkan terlaksananya norma-norma pelindungan tenaga kerja

2.1.2 Logo Instansi



Gambar 2.1 logo Disnaker

2.1.3 Badan Hukum Instansi

Berdasarkan Perda Kota Bandung No. 05 tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung maka kelembagaannya adalah Dinas di bidang ketenagakerjaan yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan serta tanggung jawab kepada Walikota.

Badan Hukum yang berkaitan dengan keberadaan Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) antara lain :

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951, tentang Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan No. 23 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia.
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 1964, tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
4. Undang-Undang No.3 Tahun 1969, tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor.
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
6. Undang-Undang No.7 Tahun 1981, tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
7. Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
9. Undang-Undang No.21 Tahun 2000,tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.
10. Undang-Undang No.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954, tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981, tentang Perlindungan Upah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Kordinasi Kegiatan Instansi vertical di Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991, tentang Latihan Kerja.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Propinsi sebagai daerah Otonom.
16. Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1980, tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.
17. Keputusan Presiden NO. 75 Tahun 1995, tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).

18. Peraturan Daerah Kota Bandung No.2 Tahun 1998, tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.
19. Peraturan daerah kota Bandung no. 05 Tahun 2000, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004.
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.
21. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001, tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004.
22. Peraturan Daerah Kota Bandung No.18 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
23. Peraturan Daerah Kota Bandung No.19 Tahun 2002, tentang Retribusi Ketenagakerjaan.
24. Peraturan Daerah Kota Bandung No.07 Tahun 2003, tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
25. Keputusan walikota No. 958 Tahun 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung.
26. Keputusan Walikota No. 959 Tahun 2003, tentang Peetunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Ketenagakerjaan, Jasa Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja, Pengujian/Pengukuran Lingkungan Kerja dan Wajib Latih Tenaga Kerja.

2.1.4 Struktur Organisasi dan Job Description

Struktur Organisasi merupakan kerangka dalam manajemen Perusahaan atau organisasi adar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Struktur Organisasi memuat tatanan kerja yang ada di perusahaan tersebut yang menyangkut tugas, tanggung jawab, dan wewenang pada masingmasing bagian. Dengan adanya struktur organisasi akan menimbulkan rasa hormat terhadap yang lain baik berkedudukan atas, dibawah ataupun setingkat. Jika dalam perusahaan tidak ada Struktur Organisasi akan mengarahkan pada kehanccuran terhadap perusahaan tersebut, jadi Struktur Organsisai menjadi factor penting dalam suatu perusahaan.

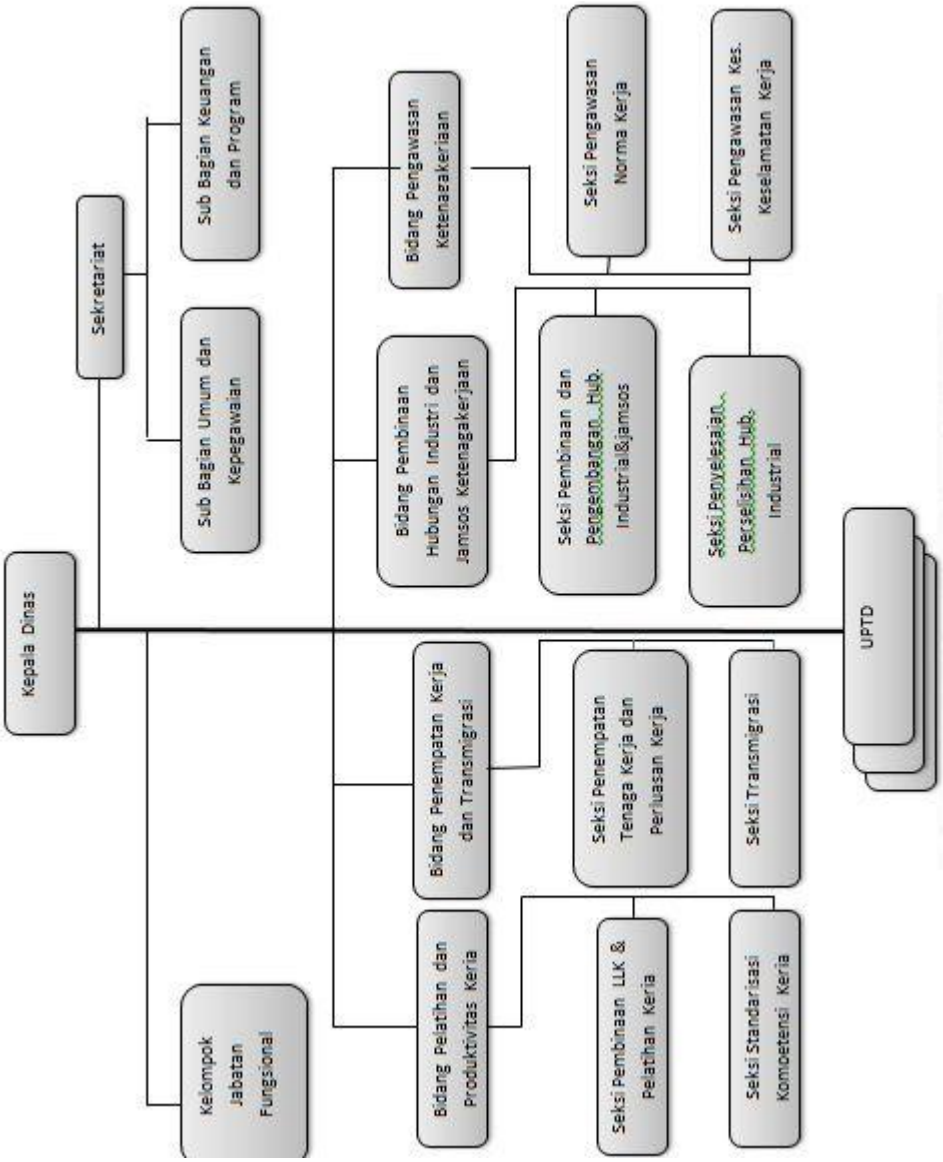
2.1.4.1 Struktur Organisasi pada Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Bandung yaitu :

- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Bagian Tata Usaha
  a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
  b) Sub Bagian Keuangan
  c) Sub Bagian Kepegawaian
  d) Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data
- Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
  a) Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja
  b) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja
  c) Seksi Informasi Pasar Kerja
  d) Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing
- Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Kerja
  a) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Lembaga Latihan Kerja
  b) Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Swasta

    c) Seksi Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja
    d) Seksi Sertifikasi Dan Lisensi Kerja
- Sub Dinas Hubungan Industrial dan Produktivitas dan Syarat Kerja
    a) Seksi Pengembangan Hubungan Industrial
    b) Seksi Pengurusan Persyaratan Kerja
    c) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kerja sama Ketenagakerjaan
    d) Seksi Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan
- Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan
    a) Seksi Pengawasan Norma Kerja
    b) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan Kerja
    c) Seksi Pengawasan Norma Kesehatan dan hygienes Perusahaan
    d) Seksi Pengawasan Norma Jamsostek, Tenaga Kerja Anak dan Wanita
- Sub Dinas Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Pengangguran
    a) Seksi Pemberdayaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Sektor Formal
    b) Seksi Pemberdayaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Sektor Informal
    c) Seksi Pemberian Kerja Sementara
    d) Seksi Pengembangan Transmigrasi
- Cabang Dinas
- UPTD
- Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang dapat dilihat sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA



Gambar 2.2 Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

2.1.4.2 Job Description

Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja oleh Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi Daerah Kota Bandung , dengan rincian sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

   Kepala Dinas tenaga kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan otonomi dan pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut , kepala dinas tenaga kerja mempunyai fungsi :

   a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan social ketenagakerjaan , serta pengawasan ketenagakerjaan.
   b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja , penempatan kerja dan transmigrasi , pembinaan hubungan industrial dan jaminan social ketenagakerjaan , serta pengawasan ketenagakerjaan.
   c. Pembinaan dan Pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja , penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan social ketenagakerjaan serta pengawasan ketenagakerjaan.
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
   e. Dan Pembinaan, monitoring, evaluasi da laporan penyelenggaraan kegiatan dinas.

2. SEKRETARIS

   1. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja lingkup kesektariatan.
   2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut , sekretaris mempunyai fungsi :
      a. Perancanaan penyusunan rencana kegiatan kesektariatan.
      b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesektariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program.
      c. Pelaksanaan pengkordinasian penyelenggaraan tugas –tugas bidang.
      d. Pelaksanaan pengkordinasian penyusunan perencanaan , evaluasi dan laporan kegiatan dinas.
      e. Pengkordinasian penyelenggaraan tugas-tugas dan
      f. Pembinaan , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesektariatan.

3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

   1. Sub bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris, lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
   2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut , Sub bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
      a. Penyusunan bahan rencana dan program pengolahan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
      b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.
      c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan dan kesejahteraan pegawai dan
      d. Evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

4. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM
    1. Sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup keuangan dan program
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub bagian keuangan dan program mempunyai fungsi :
        a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi keuangan dan program.
        b. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan ,pengusulan dan pengelolaan data anggaran , kordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas.
        c. Pelaksanaan pengendalian program yang meliputi kegiatan penyusunan bahan dan kordinasi penyusunan rencana dan program kegiatan dinas, kordinasi penyusunan rencana dan program Dinas, dan
        d. Pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan program dinas.

5. SUB BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KERJA
    1. Bidang pelatihan dan produktivitas kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pelatihan dan produktivitas kerja.
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang pelatihan dan produktivitas kerja mempunyai fungsi :
        a. Penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja.
        b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja.
        c. Pelaksanaan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja, dan
        d. Monitoring , evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja.

6. SEKSI STANDARISASI KOMPETENSI KERJA
    1. Seksi Standarisasi Kompetensi kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja lingkup Standarisasi Kompetensi Kerja.
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standarisasi Kompetensi Kerja mempunyai fungsi :
        a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Standarisasi Kompetensi Kerja
        b. Penyusunan perancangan bahan dan petunjuk teknis lingkup Standarisasi Kompetensi Kerja.

c. Pelaksanaan lingkup Standarisasi Kompetensi Kerja yang meliput intentarisasi dan klasifikasi pekerjaan, pembinaan dan faslilitas Standarisasi Kompetensi Kerja.
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Standarisasi Kompetensi Kerja.

7. SEKSI PEMBINAAN LEMBAGA LATIHAN KERJA DAN PELATIHAN KERJA
   1. Seksi pembinaan Lembaga Latihan Kerja dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja
   2. Untuk melaksankan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1),Seksi Pembinaan LLK dan Pelatihan Kerja mempunyai fungsi :
      a. Pengumpulan dan Penganalisaan data lingkup Pembinaan LLK dan Pelatihan kerja.
      b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan LLK dan pelatihan kerja.
      c. Pelaksanaan lingkup pembinaan LLK dan Pelatihan Kerja yang meliputi intentarisasi LLK dan Pelatihan Kerja, pembinaan peningkatan produktivitas kerja dan fasilitas pemagangan kerja di dalam negeri ataupun luar negeri.
      d. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan lembaga pelatihan , dan
      e. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja.

8. BIDANG PENEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI
   1. Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Penempatan Kerja dan Transmigrasi.
   2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
      a. Penyusunan rencana dan program lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi.
      b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penempatan kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi.
      c. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi.
      d. Pengkajian rekomendasi , pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi.
      e. Pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja serta transmigrasi.

9. SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA
   1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penempatan tenaga kerja dan transimigrasi lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
   2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan Penganalisaan data lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Peluasan Kerja.
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
c. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja yang meliputi pendaftaran pencari kerja, penyediaan informasi loker/bursa kerja, fasillitas Penempatan Tenaga Kerja bagi Pencari Kerja, pembinaan ,penyuluhan, pengawasan dan rekomendasi penyelenggaran penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) Kota Bandung, serta fassilitas pendirian lembaga bursa kerja.
d. Penyuluhan dan Pengawasan penyelenggaraan pendirian kantor cabang pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Kota Bandung dan penyuluhan dan pengawasan penerbitan passport TKI asal kota.
e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.

10. SEKSI TRANSMIGRASI
    1. Seksi Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Transmigrasi mempunyai fungsi :
        a. Pengumpulan dan Penganalisaan data lingkup transmigrasi.
        b. Penyusunan bahan perancanaan dan petunjuk teknis lingkup transmigrasi.
        c. Pelaksanaan lingkup transmigrasi yang meliputi intentarisasi potensi transmigrasi, penyuluhan dan motivasi transmigrasi, penjajagan lokasi dan kerjasama penempatan transmigrasi serta monitoring kondisi transmigrasi, dan
        d. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup transmigrasi.
11. BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
    1. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas lingkup Pembinaan hubungan industrial dan jaminan social ketenagakerjaan.
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
        a. Penyusunan rencana dan program lingkup Pembinaan ketengakerjaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
        b. Penyusunan petunjuk teknik lingkup Pembinaan dan Pengembangan hubungan industrial dan jamian social ketenagakerjaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
        c. Pelaksanaan lingkup Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan ketenagakerjaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
        d. Pengkajian rekomendasi , pengawasan dan pengendalian ,penyelenggaraan hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja ,dan

e. Pembinaan,monitoring,evaluasi dan pelaporan lingkup Pembinaan dan Pengembangan hubungan industrial dan jaminan social ketenagakerjaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

12. SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
    1. Seksi dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan social ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Pembinaan hubungan industrial dan jaminan social ketenagakerjaan.
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan social ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
        a. Pengumpulan dan Penganalisaan data lingkup Pembinaan dan Pengembangan hubungan industrial dan jaminan social ketenagakerjaan.
        b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan social ketenagakerjaan.
        c. Pelaksanaan lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial daj jaminan social ketenagakerjaan yang meliputi fasilitas penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) dan perjanjian pekerjaan ,pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PPKWT), pencatatan organisasi pekerjja dan pengusaha dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja pembinaan kepersertaan jaminan social serta penyusunan usutan penetapan upah minimum kota.
        d. Penyuluhan dan Pengawasan penyelenggaraan operasional perusahaan penyedia jasa yang berdomisili di kota.
        e. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan social ketenagakerjaan.
13. SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
    1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan social ketenagakerjaan lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai fungsi :
        a. Pengumpulan dan Penganalisaan data lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
        b. Penyusunan bahan petunjuk teknik lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
        c. Pelaksanaan lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang meliputi pembinaan, pencegahan dan fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan, pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan, penyusunan, pengusuhan formasi dan pembinaan mediator ,konsiliator dan arbiter serta penerimaan pendaftaran dan seleksi calon hakim adhoc pengadilan hubungan industrial.

d. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

14. BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
    1. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas lingkup bidang pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja.
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
        a. Penyusunan rencana dan program lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja.
        b. Penyusunan petunjuk teknik lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja.
        c. Pelaksanaan lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja.
        d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasaan kesehatan dan keselamatan kerja.

15. SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA
    1. Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan ketenagakerjaan lingkup pengawasan norma kerja.
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan norma kerja mempunyai fungsi :
        a. Pengumpulan dan Penganalisaan data lingkup pengawasan norma kerja.
        b. Penyusunan bahan petunjuk teknik lingkup pengawasan norma kerja.
        c. Pelaksanaan lingkup pengawasan norma kerja yang meliputi penyuluhan, pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan norma ketenagakerjaan, menerima pengaduan , melakukan pengecekan ke lapangan dan menugaskan penyelidikan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan, penindakan dan penyelesaian sebagai tindak lanjut atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota di bidang ketenagakerjaan.
        d. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan norma kerja.

16. SEKSI PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
    1. Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dari lingkup di bidang pengawasan kesehatan kesehatan dan keselamatan kerja.
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai fungsi :
        a. Pengumpulan dan Penganalisaan data lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
        b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

c. Pelaksanaan Lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja , pemeriksaan penggunaan instansi /pesawat/mesin produksi serta peralatan keselamatan kerja, pemeriksaan dan pengujian kondisi lingkungan kerja di perusahaan serta penanganan kasus kecelakaan kerja, dan
d. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Sistem Informasi

Konsep dasar sistem ialah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi besama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, suatu system dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variable yang terorganisir, saling berinteraksi , saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian system secara umum, yaitu :

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur .
2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagaian terpadu system yang bersangkutan.
3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan system.
4. Suatu sistem merupakan bagian dari system yang saling besar.

Sedangkan Konsep dasar dari informasi dapat didefiniskan sebagai hasil dari pengolahan data satu suatu bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata yang digunakan untuk mengambil keputusan. Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpresentasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan

Jadi dapat disimpukan bahwa Sistem Informasi adalah suatu system dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mengukung fungsi operasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dangan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem Informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu system menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan system ini menyimpan , mengambil,mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima denga menggunakan system informasi atau peralatan system lainnya.

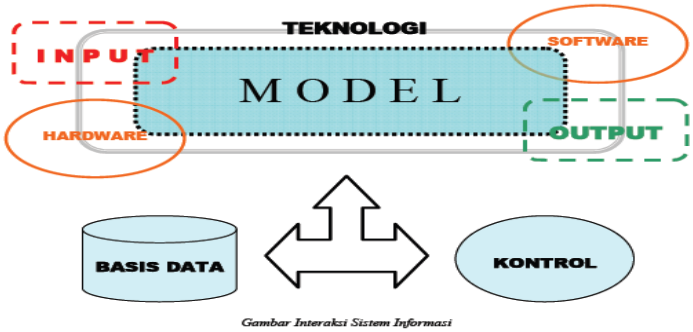
2.2.2. Komponen dan Elemen Sistem Informasi

Sistem Informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan blok bangunan (building blok), yang terdiri dari komponen,input, model, output, teknologi, hardware, software, basis data dan komponen control. Semua komponen tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan sasaran.

1. Komponen Input
   Input sebagai mewakili data yang dimasukan kedalam system informasi.
2. Komponen Model

Komponen ini terdiri dari prosedur,logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data yang diinputkan dan data yang di simpan dalam basis data untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.

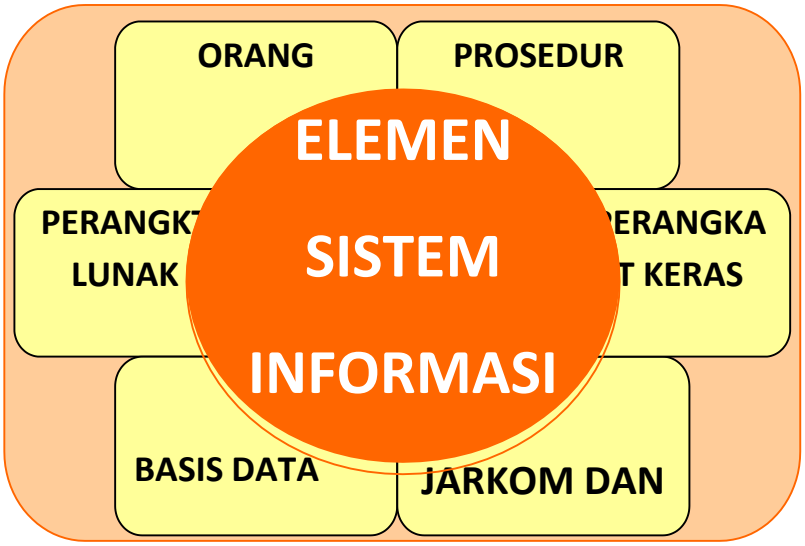
3. Komponen Output
   Hasil keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai system.
4. Komponen Teknologi
   Teknologi merupakan "tool box" dalam system informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, sehingga menghasilkan dan mengirimkan keluaran. Dan juga membantu dalam pengendalian system secara keseluruhan.
5. Komponen Hardware
   Hardware berperan penting sebagai media penyimpanan vital bagi system informasi, yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung database atau dapat dikatakan sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari system informasi.
6. Komponen Software
   Software berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, menghitung dan memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu system informasi.
7. Komponen Basis Data
   Basis Data (Database) merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Tersimpan di hardware dan menggunakan software untuk memanipulasinya. Data disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Organisasi dalam basis data perlu untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Basis Data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan DBMS (Database Management System).
8. Komponen Kontrol
   Banyak hal yang dapat merusak system informasi, seperti ketidak efisienan,sabotase,kegagalan-kegagalan dan sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal tersebut dapat dicegah apabila terjadi kesalahan-kesalahan dan dapat diatasi dengan cepat.



Gambar 2.3 Interaksi Sistem Informasi

Sedangkan Elemen-elemen yang terdiri dari orang , prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data , jaringan computer dan komunikasi data. Semua elemen ini merupakan komponen fisik.

1. Orang
   Orang atau personil yang dimaksudkan yaitu operator computer, analis system, programmer, personil data entry, dan manajer system informasi/EDP
2. Prosedur
   Prosedur merupakan elemen fisik. Hal ini disebabkan karena disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi.
3. Perangkat Keras
   Perangkat Keras bagi suatu system informasi terdiri atas computer (pusat pengolahan, unit masukan/keluaran). Peralatan penyiapan data, dan terminal masukan/keluaran.
4. Perangkat Lunak
   Perangkat Lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama :
   a. Sistem perangkat lunak umuum, seperti model analisis dan keputusan.
   b. Aplikasi perangkat lunak umum, seperti system pengoperaasian dan system manajemen data yang memungkinkan pengoperasian system computer.
   c. Aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi.
5. Basis Data
   File yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisk seperti disket,hard disk, magnetic tape, dan sebagainya. File juga meliputi keluaran tercetak dan catatan lain diatas kertas, mikro film,dan lain sebagainya.
6. Jaringan Komputer
   Jaringan Komputer adalah sebuah kumpulan computer, printer dan peralatan lainnya yang berhubungan dalam satu kesatuan,Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna computer dapat saling bertukar dokumen dan data.
7. Komunikasi Data
   Komunikasi Data adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi diantara computer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melallui media komunikasi data.



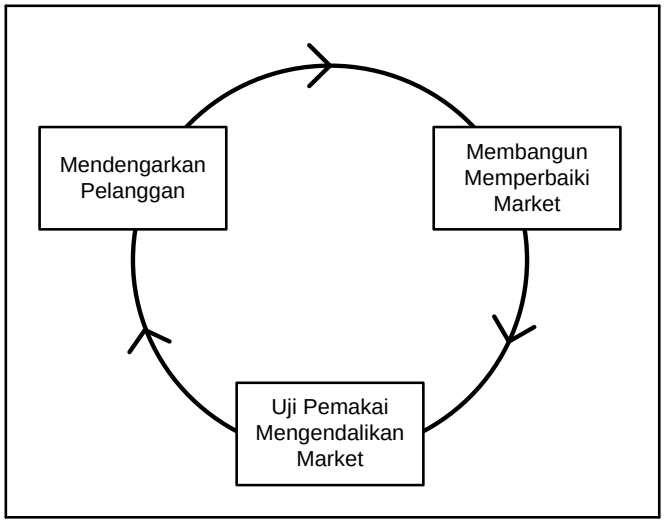
Gambar 2.4 Hubungan Elemen Sistem Informasi

2.2.3. Metode Pengembangan Sistem Informasi

Model *Prototyping Paradigma* merupakan metode pengembangan yang berfungsi sebagai sebuah mekanisme untuk mengindentifikasi kebutuhan perangkat lunak, *prototipe* bisa menjadi paradigma yang efektif bagi rekayasa perangkat lunak. Penjelasan dari *level-level* yang dilalui pada model pengembangan sistem *Prototyping Paradigma* adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Kebutuhan, pengguna dan pengembang bertemu dan mendefinisikan objektif keseluruhan dari perangkat lunak, mengindentifikasi segala kebutuhan yang diketahui dan area garis besar di mana definisi lebih jauh merupakan sebuah keharusan.
2. Perancangan Kilat, perancangan kilat berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan tampak bagi pengguna (contohnya: pendekatan *input* dan format *output*).

   Kontruksi sebuah *Prototipe*, *prototipe* tersebut dievaluasi oleh pengguna dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat keras.



Gambar 2.5 Siklus Model Prototyping Paradigma

2.2.4. Internet

Internet merupakan jaringan global computer dunia**,** besar dan sangat luas sekali dimana setiap komputer saling terhubung satu sama lainnya dari negara ke negara lainnya di seluruh dunia dan berisi berbagai macam informasi, mulai dari text, gambar, audio, video, dan lainnya. Internet itu sendiri berasal dari kata Interconnection Networking yang berarti hubungan dari banyak jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, salelit, dan lainnya.

Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini menggunakan protokol yaitu TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, sedangkan IP (Internet Protocol) yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. TPC/IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat di gunakan, mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data.

2.2.5. TCP/IP

TCP/IP transmission control/protokol/ internet protokol) adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu kmuter ke komputer lain didalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol(protokol

suite). Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak iniadalah TCP / IP stack. TCP/IP merupakan sebuah standar jaringa terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme trasport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan dimana saja. Protokol TCP/IP selalu berevolusi seiring dengan waktu, mengingat semakin banyaknya kebutuhan terhadap jaringan komputer dan internet. TCP/IP pun mempunyai beberapa layer, layer-layer itu adalah:

- IP(internet protokol) yang berperan dalam pentransmisian paket data dari node ke node.
- TCP(transmissio transfer protokol) berperan didalam memperbaiki pengiriman data yang benar dari suatu klien ke server.
- Socket merupakan nama yang diberikan kepada subrutin paket yang menyediakan akse ke TCP/IP pada kebanyakan sistem.

2.2.6. Jaringan Komputer

Jaringan Komputer bisa dikatakan sebagai sekelompok atau sekumpulan dari komputer .yang saling berhubungan satu sama lainnya, menggunakan suatu media dan protocol komunikasi tertentu sehingga dapat saling bebagi data dan informasi.

- **Local Area Network (LAN)**

LAN merupakan jaringan computer yang saling berhubungan satu sama lain dan bisa digunakan dalam kawasan terbatas . LAN bisa digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi dan workstation dalam kantor perusahaan .

- **Metropolitan Area Network (MAN)**

MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama pada LAN.Cakupan MAN biasanya kantor-kantor perusahaan terdekat yang dapat dimanfaatkan untuk pertukaran data dan informasi.

- **Wide Area Network (WAN)**

WAN merupakan jaringan computer yang menhubungkan banyak LAN dalam suatu jaringan terpadu, dimana antara satu jaringan dengan jaringan yang lain dapat bergerka ribuan kilometer atau bahkan mencakup sebuah Negara atau benua.

2.2.7. Pengertian Client Server

Client Server adalah arsitektur jaringan yang memisahkan client dengan server. Masing-masing client meminta data atau informasi dari server. Sistem client server bisa di didefinisakn sebagai system terdistribusi.

2.2.8. Basis Data

Adalah sekumpulan data persistence yang saling terkait, menggambarkan suatu organisasi(enterprise).

2.2.8.1 Sistem Basis Data

Suatu sistem yang mengelola data dan menyediakan data tersebut apabila dibutuhkan.

2.2.8.2. Komponen Sistem Basis Data

- Data yang disimpan dalam basis data.
- H/W : storage, processor, memory.
- S/W : DBMS, Report-writer, design arts, dll.
- Penggguna :
  - Pengguna Awam (Naïve User)
  - Pengguna Biasa (Casual User)
  - Programmer
  - Administrator

2.2.8.2 Keuntungan Basis Data

- Mereduksi redundansi yang akibatnya mengurangi inkonsistensi.
- Data dapat dishare antar aplikasi.
- Standarisasi data dapat dilakukan.
- Batasan security dapat diterapkan.
- Mengelola integritas (Keterjaminan Akurasi) data.

- Menyeimbangkan kebutuhan yang saling konflik.
- Independensi data (objektif DBS) : kekebalan aplikasi terhadap perubahan struktur penyimpanan dan teknik pengaksessan data.
- Basis data harus dapat berkembang tanpa mempengaruhi aplikasi yang telah ada.

2.2.9. Delphi 7.0

Borland Delphi adalah sebuah alat pengembangan aplikasi-aplikasi untuk sistem operasi Microsoft Windows. Delphi sangat berguna dan mudah digunakan untuk membuat suatu program berbasis GUI (Graphical user interface) atau console (mode teks). Borland Delphi mempunyai "saudara" bernama Borland Kylix yaitu versi Delphi yang digunakan untuk membuat aplikasi pada sistem operasi Linux. Dengan dipasangkannya Borland Delphi dengan Borland Kylix maka pengembang software dapat membuat aplikasi berbasis Windows yang dapat dengan mudah dikompilasi ulang pada Linux.
Delphi merupakan bahasa pemrograman pertama yang memecahkan batasan antara bahasa tingkat tinggi, pengembangan aplikasi dengan cepat (Rapid Application Development/RAD).

Ketika membuat aplikasi GUI dengan Delphi, pengembang perangkat lunak akan mendapatkan bahasa pemrograman (dalam hal ini Object Pascal) yang dibungkus dalam lingkungan RAD. Semua user
interface seperti form, tombol (button), dan objek list-list telah disertakan dalam Delphi dalam bentuk komponen atau control. Pengembang dapat dengan mudah menempatkan komponen-komponen tersebut ke dalam form. Pengembang dapat juga menempatkan control ActiveX pada form untuk membuat program-program khusus seperti Browser Web dalam waktu yang cepat. Delphi memungkinkan pengembang untuk merancang keseluruhan interface secara visual, dan dengan cepat dapat diimplementasikan sebuah kode perintah berbasis event (event driven) dengan mengklik mouse. Dengan Delphi, pengembang perangkat lunak dapat membuat program Windows dengan lebih cepat dan lebih mudah dari sebelumnya.

2.2.10. Pengenalan MySQL

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen database SQL (bahasa Inggris: *database management system*) atau DBMS yang *multithread*, *multi-user*, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU *General Public License* (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Tidak seperti Apache yang merupakan *software* yang dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia yaitu MySQL AB. MySQL AB memegang

penuh hak cipta hampir atas semua kode sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu orang Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah : David Axmark, Allan Larsson, dan Michael "Monty" Widenius.

MySQL memiliki beberapa kelebihan, antara lain :

a. *Free* (bebas didownload)

b. Stabil dan tangguh

c. Fleksibel dengan berbagai pemrograman

d. *Security* yang baik

e. Dukungan dari banyak komunitas

f. Kemudahan *management* database.

g. Mendukung transaksi

h. Perkembangan *software* yang cukup cepat.

Terdapat 3 jenis perintah SQL yaitu DDL, DML, dan DCL. DDL merupakan perintah MySQL yang berhubungan dengan pendefenisian suatu struktur *database*, dalam hal ini database dan *table*. DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau *record* dalam *table*. DCL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pengaturan hak akses *user* MySQL, baik terhadap *server*, database, tabel maupun *field*.

2.2.11. *Structured Query Language* (SQL)

Structured Query Language (SQL) adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan *database*. Perintah-perintah SQL digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu pada *database* seperti *update* data atau untuk mengambil data dari *database*. Pada subbab-subbab berikut ini akan dijelaskan mengenai perintah *select, insert, update dan delete* pada SQL.

1. Perintah *Select*

   Perintah *select* digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari *database* sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Berikut ini adalah format perintah *select* yang umum digunakan:

   ```
   SELECT  column1  [,column2,etc]
   FROM  tablename
   ```

[WHERE condition];

Keterangan : [ ] = optional

Column menunjukkan nama kolom dari tabel yang ingin diambil. *Column* dapat lebih dari satu atau menggunakan "*" untuk mengambil semua kolom. *Tablename* menunjukkan nama tabel yang ingin digunakan. Klausa *where* menyaring data berdasarkan kondisi yang dituliskan setelah kata *where*.

Operator-operator yang digunakan dalam klausa *where* antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Lambang	**Arti**
=	Sama dengan
>	Lebih besar dari
<	Lebih kecil dari
>=	Lebih besar sama dengan
<=	Lebih kecil sama dengan
<>	Tidak sama dengan
LIKE	(dijelaskan di bawah ini)

Tabel 2.1 Operator untuk perintah SQL

Operator LIKE dapat menyeleksi data sesuai dengan string yang diinginkan. Simbol "%" digunakan untuk mencocokkan karakter yang muncul sebelum atau sesudah karakter yang diinginkan. Contohnya adalah sebagai berikut:

```
SELECT  nama_depan, kota
FROM  karyawan
WHERE nama_depan  LIKE  'Sam%';
```

Perintah SQL di atas memiliki output semua nama depan yang diawali dengan "Sam". Simbol "%" dapat pula diletakkan di depan atau di belakang. Selain seperti

yang dijabarkan di atas, perintah select juga memiliki format lain yang lebih lengkap yang mendukung fungsi agregasi, yaitu:

```
SELECT [ALL | DISTINCT] column1[,column2]
FROM table1[,table2]
[WHERE "conditions"]
[GROUP BY "column-list"]
[HAVING "conditions]
[ORDER BY "column-list" [ASC | DESC] ]
```

Nama Fungsi	***Kegunaan***
SUM( )	*Untuk menghitung jumlah nilai pada suatu kolom*
AVG( )	*Untuk menghitung nilai rata-rata pada suatu kolom*
MAX( )	*Untuk mencari nilai maksimum pada suatu kolom*
MIN( )	*Untuk mencari nilai minimal pada suatu kolom*
COUNT( )	*Untuk menghitung jumlah baris pada suatu kolom*

Tabel 2.2 Fungsi Agregasi

Keyword *ALL* digunakan untuk mengambil semua data sedangkan *DISTINCT* digunakan untuk mengambil data yang unik dimana baris yang sama akan dijadikan satu baris saja.

1. Klausa *Group By*

Klausa *group by* akan mengumpulkan baris data dari tabel sesuai dengan kolom yang dispesifikasikan dan memperkenankan adalah fungsi agregasi pada satu atau lebih kolom. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada contoh berikut:

```
SELECT MAX(gaji), departemen
FROM karyawan
GROUP BY departemen;
```

Query ini akan mengambil dan menampilkan gaji maksimum dari karyawan dari tiap departemen dan dikelompokkan berdasarkan nama departemennya.

2. Klausa *Having*

Klausa *having* dapat menspesifikasikan kondisi dari baris untuk tiap *group*, dengan kata lain tiap baris akan diambil berdasarkan kondisi yang dispesifikasikan. Jika menggunakan klausa *having* harus diikuti dengan klausa *group by*. Contoh penggunaan dari klausa *having* adalah sebagai berikut:

```
SELECT departemen, avg(gaji)
FROM karyawan
GROUP BY departemen
HAVING avg(gaji) > 20000;
```

Pada *query* di atas jika pada *query* tersebut hanya menggunakan *group by* saja maka akan mengambil rata-rata gaji karyawan pada tiap departemen. Tetapi bila ditambahkan dengan klausa *having* maka dapat dispesifikasikan rata-rata gaji yang diambil adalah yang bernilai lebih dari 20000.

3. Klausa *Order By*

Klausa *order by* merupakan klausa *optional* yang digunakan jika kita ingin menampilkan hasil dari *query* secara urut, baik urut secara *ascending* (*ASC*) maupun secara *descending* (*DESC*), sesuai dengan kolom yang dispesifikasikan pada *order by*. Contoh penggunaannya jika diinginkan hasil urut data karyawan berdasarkan umurnya secara *ascending* adalah sebagai berikut:

```
SELECT kode_karyawan, nama_depan, umur, gaji
FROM karyawan
WHERE departemen = ‘Penjualan’
ORDER BY umur ASC;
```

Bila ingin mengurutkan berdasarkan dua atau lebih kolom, maka harus dipisahkan dengan tanda koma, seperti dijabarkan di bawah ini:

```
SELECT kode_karyawan, nama_depan, umur, gaji
FROM karyawan
WHERE departemen = ‘Penjualan’
ORDER BY umur, gaji DESC;
```

Query di atas akan mengurutkan hasil *query* berdasarkan umur, baru kemudian mengurutkan berdasarkan gaji secara *descending*.

4. *Join Table*

Dalam kenyataannya, *query* tidak hanya dari satu tabel saja, mungkin dua atau lebih. Untuk itu diperlukan *join table* untuk menggabungkan dua atau lebih tabel yang berelasi dalam suatu *database relational*. Dengan *join table* maka hanya dengan satu *query* yang menggunakan perintah *select* dapat menggabungkan data dari dua atau lebih tabel ke dalam satu hasil *query*.

Antar dua tabel yang berelasi pasti terdapat satu kolom yang sama. Kolom inilah yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel tersebut. Caranya adalah sebagai berikut:

```
SELECT konsumen.nama_depan, penjualan.no_faktur
FROM konsumen, penjualan
WHERE konsumen.kode_konsumen=penjualan.kode_konsumen;
```

Join table di atas merupakan *inner join* dimana akan menghasilkan semua nama depan dari konsumen (yang diambil dari tabel konsumen) dan nomor faktur penjualan (yang diambil dari tabel penjualan) dari semua baris dimana kode konsumen di tabel konsumen sama dengan kode konsumen di tabel penjualan.

5. Perintah *Insert*

Perintah *insert* digunakan untuk memasukkan atau menambah baris data ke dalam sebuah tabel. Format penulisan perintah *insert* adalah sebagai berikut:

```
INSERT INTO tablename (first_column, …, last_column)
VALUES (first_value, …, last value);
```

Parameter setelah *tablename* adalah daftar kolom-kolom yang dipisahkan dengan koma, diikuti dengan kata *values* lalu diikuti lagi dengan daftar nilai yang urutannya sesuai dengan daftar kolom sebelum kata *values*. Untuk nilai yang bernilai *string* harus diapit dengan tanda petik satu sedangkan untuk yang bernilai integer tidak. Contohnya adalah sebagai berikut:

```
INSERT INTO karyawan (nama_depan, nama_belakang, umur, kota)
VALUES (‘Sam’, ‘Ali’, 21, ‘Surabaya’);
```

Query di atas akan menambahkan baris baru pada tabel karyawan dengan *field* nama_depan bernilai “Sam”, *field* nama_belakang bernilai “Ali”, *field* umur bernilai 21 dan *field* kota bernilai “Surabaya”.

6. Perintah *Update*

Perintah *update* digunakan untuk mengubah data yang sudah ada berdasarkan kondisi tertentu yang dijabarkan oleh *keyword where*. Format perintah lengkapnya adalah sebagai berikut:

UPDATE tablename
SET columnname =newvalue[,nextcolumn = newvalue2..]
WHERE columnname <OPERATOR> value
[and|or column" <OPERATOR> "value"];
keterangan : [ ] = optional
Contoh penggunaan :
UPDATE karyawan
SET umur = 15
WHERE nama_depan = ‘Sam’;

7. Perintah *Delete*

Perintah delete digunakan untuk menghapus baris dari suatu tabel. Formatnya adalah sebagai berikut:

DELETE FROM tablename
WHERE columnname <OPERATOR> value [and|or column
<operator> value]
keterangan: [ ] = optional
Contoh penggunaannya adalah seperti di bawah ini:
DELETE FROM karyawan
WHERE nama_depan = ‘Sam’;
Contoh di atas akan menghapus baris dari tabel “karyawan” yang field “nama_depan”-nya bernilai “Ali”. Untuk menghapus seluruh baris dari suatu tabel, kosongkan klausa *where.*

2.2.12. ODBC (Open Database Connectivity)

Open Database Connectivity atau kalau disingkat ODBC adalah protocol Standar digunakan untuk memanggil/mengakses informasi dari SQL database server. ODBC memungkinkan sebuah aplikasi memanggil fungsi-fungsi interface yang diimplementasikan pada modul-modul yang disebut dengan driver.

Pada prinsipnya, ODBC adalah untuk penghubungkan antara suatu aplikasi dengan database server yang saling berkomunikasi , database server diantaranya seperti Microsoft SQL Server 2000, Microsotf SQL Database Server, MySQL Connector ODBC 5.1.9 dan data program lain yang menyediakan 32-bit driver yang memenuhi ODBC level 1 dalam mengakses data tersebut.

2.2.13. InstallShield Express

Aplikasi dari komponen Delphi 7.0 yang dimana berfungsi untuk menginstallasi sebuah file dari project packages delphi dengan format exe. Produk ini menyediakan dengan cepat dan mudah dalam installasi packages. Susunan dalam memulai pembangunan project baru diantaranya :

1. File → Klik New Project button pada toolbar.
2. Pilih Blank Setup Project kemudian klik button “create”.
3. Selanjutnya ikuti langkah-langkah selanjutnya.